

MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA DAN KARAKTER MULTIKULTURAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (INKLUSIVISME JALAN MENUJU DIALOG)

Imron Bima Saputra¹, Rahmad Hidayat², Muhammad Said Abdul Wahid³
Universitas Dharmawangsa

Kata Kunci:

moderasi beragama, multikultural, pendidikan islam, inklusivisme, dialog.

***Correspondence Address:**

imronbima0401@gmail.com

Abstrak: Moderasi beragama dan karakter multikultural merupakan dua konsep yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang moderat dan multikultural. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang bagaimana mewujudkan moderasi beragama dan karakter multikultural di lembaga pendidikan Islam melalui pendekatan inklusivisme dan dialog. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama bukanlah hal baru. Para pendahulu kita telah memberikan keteladanan dalam membangun bangsa ini. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi penghalang di dalam menjalin persaudaraan dan persatuan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, seperti terlihat dalam sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan juga hasil rumusan Pancasila. Indonesia adalah bangsa yang penduduknya multikultural dan multi agama yang ingin hidup dengan aman, damai dan tertib dalam kebersamaan dan kebinekaan. Untuk itulah pola pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia dikembangkan dengan rumusan tri kerukunan umat beragama yaitu: *pertama*, kerukunan internal umat beragama, *kedua*, kerukunan antar umat beragama dan *ketiga*, kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan internal umat beragama adalah terciptanya kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu agama atau umat tertentu atau komunitas agama. Kerukunan antar umat beragama adalah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, contohnya antara pemeluk agama Islam dengan Protestan, Katolik, Hindu, Budha. Sedangkan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah adalah terciptanya keserasian dan keselarasan antara pemuka agama dengan pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun rakyat Indonesia yang berjiwa agama, sehingga diharapkan

akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur serta taat menjalankan perintah agamanya.

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam upaya turut serta memajukan kehidupan beragama dan bermasyarakat serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sedangkan para pemeluk agama tidak perlu mengingkari kaedah kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Sebaliknya tidak perlu menjadi manusia yang mengingkari imannya untuk menjadi bangsa Indonesia yang patuh terhadap bangsa dan negaranya.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai dialog antar agama kelihatannya hanya bisa dimulai dengan mengandaikan adanya keterbukaan sebuah agama terhadap agama yang lain. Masalahnya mungkin baru timbul bila kemudian mulai dipersoalkan secara terperinci apa yang dimaksud dengan keterbukaan, segi-segi mana dari suatu agama yang memungkinkannya untuk terbuka terhadap agama lain, pada tingkat mana keterbukaan itu dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain perlu adanya rumusan batas-batas kemungkinan keterbukaan itu dapat dilakukan.

Moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sikap yang seimbang dan tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama dapat membantu siswa memahami ajaran agama dengan lebih baik dan tidak ekstrem. Pendidikan agama yang moderat dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis dalam memahami ajaran agama.

Karakter multikultural dalam pendidikan Islam merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan agama. Karakter multikultural dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan Islam yang multikultural dapat membantu siswa memahami bahwa Islam adalah agama yang toleran dan menghargai perbedaan.

Pendekatan Inklusivisme yang menekankan pada pentingnya memahami dan menghargai perbedaan. Inklusivisme dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks pendidikan Islam, inklusivisme dapat membantu siswa memahami bahwa Islam adalah agama yang toleran dan menghargai perbedaan.

Dialog merupakan sarana yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif. Dialog dapat membantu siswa memahami perbedaan dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Dalam konteks pendidikan Islam, dialog dapat membantu siswa memahami ajaran agama dengan lebih baik dan tidak ekstrem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait topik penelitian yang sedang diteliti (Patton: 2015)

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan melalui penelaah atas referensi yang relevan, utamanya terkait moderasi beragama dan karakter multicultural (Corbin & Strauss, 2010). teknik pengumpulan data menggunakan teknik literer yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui tiga cara yaitu editing, pengorganisasian, dan penemuan hasil penelitian. Kemudian untuk analisis data menggunakan analisis isi, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari tidak langsung terkait moderasi beragama dan karakter multicultural inklusivisme jalan menuju dialog.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptual Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke sedang-an yakni tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Bahasa Inggris memuat kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non aligned* (tidak berpihak). Secara

umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai pilihan terbaik. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *wasit* yang memiliki tiga pengertian, yaitu: penengah, perantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis kemudian peleraian (pemisah, pendamai) antara yang berselisih dan pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Misalnya, kata *dermawan*, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata *pemberani*, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, radikal, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya. Dalam KBBI, kata *ekstrem* didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*.

Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem.

Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain (Hasan, 2019).

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan,

serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Indikator Moderasi Beragama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks.

Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama. Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki.

Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap

konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan.

Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Pengertian Multikultural

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya (Suparlan, 2002).

Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Ibrahim, 2013).

Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Istilah multibudaya (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California (Banks, 1984). Multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya (Kymlicka, 1999).

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, ke suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya (Ibrahim, 2013). Dari karakteristik ini, dapat dikembangkan pemahaman mengenai multikulturalisme yaitu sebagai sebuah paham tentang kultur yang beragam. Dalam situasi keragaman kultur ini meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, penghargaan, penghormatan, kerjasama dan lainnya agar tercipta suatu

kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik dan kekerasan (Naim & Syauqi, 2008).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik dan budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai dengan kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Adapun masyarakat multikultur adalah masyarakat yang mampu menekankan dirinya sebagai arbitrer yaitu sebagai penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut menemui titik jenuh. Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, dibedakan menjadi lima macam (Rahman, 2013). *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlihat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Suharno, 2016).

Membangun Inklusivisme

Kehidupan sering dikagetkan dengan banyak peristiwa di luar prediksi pemikiran manusia. Banyak kejadian yang ditelusuri lebih jauh dan mendalam merupakan simbol-simbol dari apa yang selama ini telah kita lakukan dalam bermasyarakat. Sebagai masyarakat yang beragama (*religius sociaty*) sering diguncang dengan banyaknya peristiwa yang sentimental, rasial, *collective violence*, dengan upaya-upaya seperti mengail di air keruh sehingga tampak bermuatan keagamaan (Shihab, 1998).

Semuanya itu berubah menjadi peristiwa yang sarat dengan sentimen-sentimen keagamaan sehingga tak jarang membuyarkan harapan bahwa agama adalah pembawa damai dan keselamatan bersama. Agama menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan bersama. Perilaku umat beragama tampak tak bersesuaian dengan anjuran kitab suci agama. Suasana paradoks sering mengiringi kehidupan umat. Lebih-lebih bagi mereka yang merasa dengan melakukan pelanggaran atau penghalangan terhadap sesama pemeluk agama adalah sebuah investasi pahala. Perbuatan menghalangi atau melarang adalah jihad yang didorong oleh justifikasi agama. Suasana semacam ini akhirnya membawa dampak pada keterbelakangan kehidupan agama (Shihab, 1996).

Perasaan sentimental pada umat beragama yang telah mengental tidak berdiri sendirian, ia mendapat legitimasi kekuasaan yang merupakan justifikasi terkuat karena disahkan untuk memaksakan sebuah kebijakan sehingga pada ujung-ujungnya antara umat beragama pun bisa saling membunuh atas nama agama. Sumber legitimasi tersebut barangkali memang perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga tidak mendorong agama-agama untuk memanfaatkan momen-momen tertentu yang dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menelikung saudara sebangsa dan setanah air.

Kekuatan legitimasi dari wacana agama menjadi semakin kuat dominasinya dalam sebuah negara yang memang dengan senganja memanfaatkan agama sebagai sumber justifikasi atas apa yang hendak difatwakan, walaupun salah satu atau sebagian dari anggota masyarakat itu dirugikan atau banyak orang keberatan karena itu di luar pemikiran manusia. Tetapi, karena merasa mendapat angin dari pihak agama (dogma-dogma agama) dan sekaligus dukungan sebuah rezim politik tertentu, maka kebijakan tersebut tetap difatwakan secara tegas. Tragis memang, dan mendistorsi wacana agama, tetapi itu sering menjadi realitas yang tidak bisa ditolak kehadirannya.

Wacana agama dikerangkeng dalam sangkar besi yang teramat kuat sehingga tidak terjamah masyarakat awam dan menjadi sangat eksklusif serta mencekam setiap orang yang beragama namun tidak memiliki akses politik kekuasaan, atau hanya sedikit akses politik karena telah segala pintu dan wilayah sehingga tidak bisa memasuki, karena dijaga oleh tradisi politik keagamaan yang dominan. Dalam konteks seperti di atas, sudah saatnya bagaimana agama bisa dihadirkan kembali sebagai wacana yang tidak menakutkan, tetapi penuh kedamaian dan kasih sayang.

Penganut agama-agama agaknya perlu berpikir ulang secara bersama mengenai semangat inklusivisme. Pemegang otoritas dominan atas tafsir teks kitab suci agama barangkali perlu dikonstruksi kembali, sehingga tidak membelenggu wacana agama itu sendiri yang memang dengan seperangkat ajarannya telah mengajarkan supaya umatnya hidup damai, harmonis dan selalu dalam keterbukaan. Inilah beberapa pemikiran awal untuk menuju dialog dan menghilangkan sekat-sekat eksklusivisme dan menjalin hubungan antar agama (Abdullah, 2017).

Sikap Dialog Antar Umat Beragama

Pluralisme tidak dapat dipahami dengan hanya mengatakan bahwa masyarakat kita mejemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluramentasi juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai kebaikan negatif (*negative good*) hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (Rachman, 2001).

Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia, Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.

Kutipan panjang pembukaan di atas menegaskan adanya masalah besar dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh kenyataan pluralisme dewasa ini. Dan salah satu masalah besar dari paham pluralisme yang telah menyulut perdebatan abadi sepanjang

masa menyangkut masalah keselamatan adalah bagaimana suatu teologi dari suatu agama. Untuk mendapatkan suatu pemahaman teologi yang pluralis seperti dikemukakan di atas, sangat penting mengerti segi-segi konsekuensial dari sikap keberagamaan kita, bahwa sikap keberagaman kita menentukan bagaimana pandangan terhadap agama-agama lain. Dalam penelitian ilmu agama, paling tidak ada tiga sikap keberagaman yaitu eksklusivisme, inklusivisme dan paralelisme (Permata, 2000).

Dialog dan Kerjasama

Perlembaan agama-agama sedunia pada tahun 1993 yang diadakan di Chicago, mengeluarkan suatu deklarasi menuju etika global. Tidak ada tata global baru tanpa suatu etika global baru. Suatu tuntunan mendasar adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik. Ada 4 komitmen yang menjadi orientasi yaitu: komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan budaya hormat terhadap kehidupan, komitmen terhadap budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, komitmen terhadap budaya toleransi dan kehidupan yang setia terhadap kebenaran, komitmen terhadap budaya dengan kesamaan hak-hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan (Panikar, 1994).

Akhirnya deklarasi menegaskan, bahwa bumi tak akan dapat diperbaiki, kecuali kita mencapai transformasi dalam kesabaran orang-perorangan maupun dalam kehidupan masyarakat. Secara lebih konkret, membangun kerukunan antar umat beragama dapat digambarkan dalam 4 macam bentuk kegiatan yaitu: *Pertama*, dialog kehidupan antar umat beragama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling mengenal. Dialog ini terjadi dalam kehidupan bersama sehari-hari, di mana orang-orang dengan iman yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama, suka, kecemasan dan pengharapan bersama.

Dari situ muncullah kepedulian pula. Orang-orang yang hidup berdampingan sebagai suatu komunitas menghadapi kebutuhan-kebutuhan bersama, kebutuhan air bersih, perumahan yang sehat, pendidikan yang cukup, kebutuhan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Komunitas yang sama mempunyai kepedulian bersama terhadap situasi yang tidak adil yang merugikan sesamanya. Bersama-sama pula dirasakan perlunya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar tidak dimanipulasikan oleh kepentingan-kepentingan komersial yang tidak adil, yang tidak hanya menelantarkan orang-orang, tetapi juga menghancurkan alam.

Dialog kehidupan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan memunculkan kepedulian bersama. *Kedua*, dialog pengalaman religius. Di sini umat yang beragama

berbeda-beda berbagai pengalaman iman secara lebih mendalam. Pada dataran ini umat satu sama lain dapat saling memperkaya penafsiran dan penghayatan iman, saling mentransformasikan hidup berimannya. Dialog yang jujur mengandaikan kebebasan dan kesanggupan untuk berbagi pengalaman. Kalau momen ini bisa terjadi, maka dialog antar umat beriman dan umat beragama akan mampu bersama-sama mencari dan menemukan kehendak dalam situasi hidup nyata yang dialami dan dihadapi bersama, tanpa hal ini dialog menjadi dangkal.

Sampai pada bentuk Ketiga, dialog teologis. Pada tataran ini dapat dijalankan dialog macam-macam ungkapan atau fungsi keagamaan. Bersama-sama dapat dijalankan analisis mengenai situasi yang dialami bersama, dapat pula diadakan kajian teologis, baik pada taraf teologis ilmiah maupun pada taraf berbagai pengalaman yang lebih sederhana. Dapat pula dibicarakan hal-ihwal yang merupakan pertanyaan bahkan kecurigan dari dua belah pihak. Demikian misalnya dapat dibicarakan isu mengenai Kristenisasi, mengenai Islamisasi, dapat dibahas perbedaan-perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai situasi sosial yang ada.

Akhirnya bentuk kegiatan ke empat, dialog aksi atau kerjasama untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil. Pada dialog aksi umat antara agama bersama-sama mentransformasikan masyarakat akan menjadi lebih adil, agar keutuhan ciptaan, lingkungan hidup dilestarikan. Dalam konteks pluralisme religius dan tantangan kemiskinan, jati diri lembaga agama komunitas pelayanan yang bersifat dialogal dan transformatif. Transformasi yang terjadi bukanlah hanya kehidupan masyarakat, melainkan juga kehidupan beriman, menjadi lebih mendalam. Dalam kesaksian iman, di mana perjuangan untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan merupakan bagian integral jati diri.

Ber macam macam dialog sebagaimana diuraikan di atas kiranya bukanlah suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia. Kalau disadari hal yang sudah berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan, kiranya hal itu juga dapat lebih disyukuri dan dikembangkan.

Strategi Mewujudkan Moderasi Beragama dan Karakter Multikultural

Untuk mewujudkan moderasi beragama dan karakter multikultural pada Lembaga Pendidikan ada beberapa strategi yang dirumuskan di antaranya adalah:

1. Pendidikan Agama yang Inklusif: Pendidikan agama yang inklusif dapat membantu siswa memahami ajaran agama dengan lebih baik dan tidak ekstrem. Pendidikan

agama yang inklusif juga dapat membantu siswa memahami perbedaan agama dan budaya.

2. Kurikulum yang Multikultural: Kurikulum yang multikultural dapat membantu siswa memahami perbedaan budaya dan agama. Kurikulum yang multikultural juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda.
3. Guru yang Berkarakter Multikultural: Guru yang berkarakter multikultural dapat membantu siswa memahami perbedaan budaya dan agama. Guru yang berkarakter multikultural juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda.
4. Aktivitas Ekstrakurikuler yang Multikultural: Aktivitas ekstrakurikuler yang multikultural dapat membantu siswa memahami perbedaan budaya dan agama. Aktivitas ekstrakurikuler yang multikultural juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda.

KESIMPULAN

1. Moderasi beragama dan karakter multikultural sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis di lembaga pendidikan Islam.
2. Inklusivisme dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mewujudkan moderasi beragama dan karakter multikultural di lembaga pendidikan Islam.
3. Dialog dapat menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif di lembaga pendidikan Islam.
4. Pendidikan agama yang inklusif dapat membantu siswa memahami ajaran agama dengan lebih baik dan tidak ekstrem.
5. Kurikulum yang multikultural dapat membantu siswa memahami perbedaan budaya dan agama.
6. Guru yang berkarakter multikultural dapat membantu siswa memahami perbedaan budaya dan agama.
7. Pendidikan yang inklusif sangat penting dalam mewujudkan moderasi beragama dan karakter multikultural di lembaga pendidikan Islam.
8. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk

karakter siswa yang moderat dan multikultural.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2017). "*Pendidikan Agama Islam yang Inklusif: Sebuah Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis.*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 1-15.
- Ahmad Norma Permata, (ed.). *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Kanius, 2000), Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Hasan, N. (2019). "*Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Teoritis.*" *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 1-12.
- James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), h. 164.
- Juliet Corbin & Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, *Canadian Journal of University Continuing Education* 36, no. 2 (2010): h. 463–465.
- M.Quraish Shihab, dkk. *Atas Nama Agama*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), h. 285.
- M.Qurish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 45.
- Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 125.
- Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 1.
- Patton author. Michael Quinn, *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice*, (SAGE Publications Ltd STM, 2015).
- Rahman, F. (2018). "*Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam: Sebuah Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Inklusif.*" *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 2(1), 1-10.
- Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*, dalam *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 133.

- Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*, dalam *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 133.
- Suharno, *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016).
- Will, Kymlicka, "Mitsunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h. 24.
- Raimundo Panikar, *Dialog Intra Religius*, (Jakarta: Kanisius, 1994), h. 120